

Pengangguran dan Kemiskinan di Tengah Melimpahnya Sumber Daya Tambang

Author:

Ahmad Taufik

**The Reform
Initiatives**

Phone

+62 811 99 5259

Email

ahmad.taufik@tri.or.id

Website

www.tri.or.id

*Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7
Menteng, Jakarta Pusat*

Pendahuluan

Dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki tagline “membangun OKI dari desa”. Tagline pembangunan tersebut merupakan manifestasi dari visi daerah 2014-2019 yakni “Terwujudnya Masyarakat OKI Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Ada tiga tujuan dari visi pembangunan daerah, (1) OKI Maju, (2) OKI Mandiri, dan (3) OKI Sejahtera. Semua tujuan tersebut harus berlandaskan Iman dan Taqwa. Tujuan “OKI Maju” sebagai tujuan awal memiliki makna OKI sebagai wilayah dan masyarakatnya maju, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor potensial lainnya untuk menyesuaikan dengan kemajuan global tanpa menghilangkan ciri identitas masyarakat OKI. Tujuan kedua “OKI Mandiri” memiliki makna sebagai Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan makna “OKI Sejahtera” bertujuan mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, serta meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga memiliki penghidupan yang layak/seimbang jasmani dan rohani, berdaya saing, memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, serta memiliki integritas dan moralitas sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih mandiri dan maju, yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mewujudkan visi pembangunan OKI 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan. Pertama, Mewujudkan Pembangunan Dari Desa. Kedua, Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Keempat, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kelima, Mewujudkan Penataan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang Yang Ramah Lingkungan, dan Keenam Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya. Terlihat dari arah kebijakan daerah OKI, pertumbuhan ekonomi akan menjadi panglima untuk mendorong sektor potensial daerah yang akan menggerakkan lini ekonomi daerah.

Pertumbuhan “Semu” Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah OKI harus melihat kondisi dan peluang dalam mengambil keputusan strategis menyangkut kebijakan ekonomi daerah. Target pertumbuhan ekonomi selalu menjadi “argumentasi” pemerintah daerah untuk mengeruk “sumber daya” alam. Atas dasar mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah menyerahkan “sumber daya” tersebut kepada pemilik modal. Faktanya, masyarakat yang menjadi “subjek” atas nama kesejahteraan selalu berakhir menjadi “objek” terdepan dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Potret tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan banyak daerah lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Alih-alih ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan daerah, pemerintah daerah “tega” memberikan izin-izin kepada pemilik modal.

PDRB Kab. OKI, 2010-2012			
Uraian	2010	2011	2012
Pertanian	3.313.039	3.701.433	4.047.149
Pertambangan dan Penggalian	135.522	151.088	173.030
Industri Pengolahan	548.652	617.628	708.212
Listrik, Gas dan Air Bersih	4.837	5.428	6.121
Bangunan	950.402	1.167.225	1.396.550
Perdagangan, Hotel dan Restoran	985.672	1.156.739	1.348.463
Pengangkutan dan Komunikasi	92.488	109.155	130.038
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	164.544	192.558	222.413
Jasa	752.174	884.479	1.071.502
PDRB	6.946.330	7.985.733	9.103.478

Sumber: Daerah Dalam Angka Kab. OKI 2013 dan 2012

Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) OKI, 2010-2012. Sektor pertanian merupakan sektor primer yang menyumbang 46,2 persen, disusul Bangunan 14,5 persen dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,5 persen dalam rata-rata 3 tahun terakhir. Semakin tingginya permintaan akan *Crude Palm Oil* (CPO) mengakibatkan peningkatan konversi lahan di banyak kabupaten di Indonesia menjadi perkebunan kelapa sawit. Begitu pula halnya di Kabupaten OKI. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, dilakukan semenjak keluarnya izin prinsip Bupati OKI nomor 460/1998/BPN/26-27/2005 pada 2005. Izin prinsip ini, menjadi dasar bagi perusahaan untuk menggarap lahan seluas 42 ribu hektare di Kabupaten OKI.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan juga akan menjadi sumber ekonomi baru yang akan menjadi tumpuan ekonomi daerah. Walaupun belum menjadi sektor primer penyumbang ekonomi daerah. Hal tersebut, terkonfirmasi dengan pernyataan Wakil Bupati, M. Rifa'i, SE dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKI, Ir H Djustaf yang mengatakan bahwa “ada 16 perusahaan yang sudah berniat untuk berinvestasi di Kabupaten OKI untuk mengelola sumber tambang batubara dan gas metan yang ada di kabupaten OKI. Keduanya berharap hasil dari eksplorasi tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah.¹ Tambang Batubara dan Gas Metan menjadi primadona, sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Padahal, dampak kerusakan sosial-ekologis yang diakibatkan dari eksplorasi dan eksploitasi tambang tersebut, belum tentu sebanding dengan keuntungan ekonomi semata.

Terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di OKI, dari 5,08 persen tahun 2010 menjadi 6,90 persen pada tahun 2011, bahkan peningkatan tersebut melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,5 persen. Selain itu peningkatan pendapatan daerah pun meningkat sebesar Rp639 miliar, sejak tahun 2009-2013. Pendapatan daerah

¹ <http://kabarsumatera.com/2014/05/16-titik-sumber-gas-dan-batubara-ditemukan/> (Diakses pada 27 Mei 2014). Lihat juga dalam website resmi pemkab OKI di <http://go.kaboki.go.id/potensi/pertambangan>

OKI meningkat dari Rp815 miliar tahun 2009 menjadi Rp1,45 triliun pada 2013. Peningkatan tersebut, tidak membuat masyarakat OKI terbebas dari kemiskinan dan pengangguran. Selain masalah pengangguran dan masalah kemiskinan, konflik sosial (tenurial) pun tidak dapat terhindarkan antara warga dengan perusahaan/aparat pemerintah.

Sayangnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2011, kemiskinan OKI mendapat peringkat empat tertinggi se-Sumatra Selatan dari 15 kabupaten/kota. Angka kemiskinan tertinggi terdapat di Musi Banyuasin, sebesar 18,99 persen dan terendah di OKU Timur sebesar 9,23 persen, sedangkan OKI sendiri sebesar 15,06 persen. BPS Sumsel mencatat angka kemiskinan OKI tahun 2012 hanya berkurang 0,53 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 14,53 persen.

Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut:

- Mewujudkan Pembangunan dari Desa
- Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
- Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- Mewujudkan Penataan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang Yang Ramah Lingkungan
- Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya.

Selain itu, tidak berdampaknya peningkatan pendapatan daerah juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran Kabupaten OKI meningkat drastis, dari 7,9 persen tahun 2008 menjadi 12,3 persen pada tahun 2012. Peningkatan tersebut, menjadikan OKI sebagai daerah pengangguran tertinggi se-Sumatra Selatan. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, dan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Kondisi ini membuktikan masih adanya kesenjangan dalam pembangunan di OKI yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhannya. Padahal idealnya, pertumbuhan ekonomi bisa terukur dengan kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang tercantum dalam misi pertama, yakni “mewujudkan pembangunan dari desa” dengan cara mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan investasi lahan di OKI ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam, tidak hanya itu kerugian ekologis dan sosial, seperti dampak bencana alam dan konflik yang tinggi disebabkan dari kebijakan investasi lahan yang hanya berorientasi materi semata, tanpa mempertimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

Padahal, dalam misi ke-3 dan ke-4 untuk mewujudkan pembangunan daerah daerah OKI 2014-2019 adalah “mensejahterakan masyarakat dan membangun peningkatan pertumbuhan ekonomi”. Dua hal yang harus terwujud secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Selain itu, dalam misi ke-5 juga disebutkan “mewujudkan penataan pemanfaatan dan peruntukan ruang yang ramah lingkungan”. Kondisi tersebut tidak boleh terulang, sebagai akibat dari kebijakan ekonomi daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam semata.

Evaluasi Anggaran Pertambangan

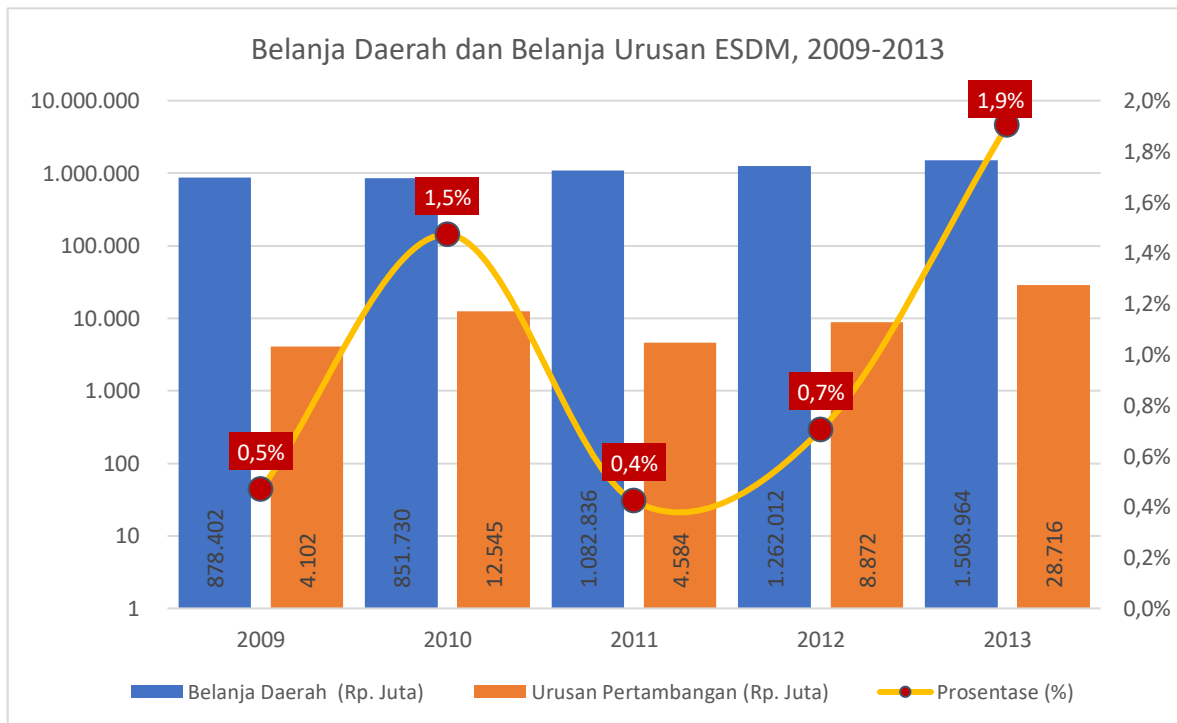
Saat ini, pendapatan dari sektor pertambangan menempati peringkat ketiga setelah minyak bumi dan gas bumi. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dari sektor tambang pada periode 2011-2012 berkontribusi sebesar 13,6% dari total DBH-SDA. Dengan potensi pertambangan yang masih tinggi, pemerintah daerah tidak bisa bertumpu pada

sumber daya alam seterusnya. Banyak daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi terjebak pada kutukan sumber daya, yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti cita-cita visi-misi pembangunan daerah OKI.

Tahun	Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-rent)	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)	Total DBH Tambang Umum
2010	172.722.419	11.346.156.468	11.518.878.887
2011	414.959.615	14.416.551.653	14.831.511.268
2012	115.981.973	19.675.343.441	19.791.325.414

Sumber: APBD Kab. OKI, 2010-2012

Belanja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lebih dari 2 persen dari belanja daerahnya. Rata-rata dalam periode 2009-2013 hanya sebesar Rp11,7 miliar atau hanya 1 persen dari belanja daerahnya.



Selain itu, sebaran belanja urusan ESDM juga tidak proporsional sesuai dengan permasalahannya. Walaupun belanja pegawai dan program administrasi/aparaturnya menurun, tetapi proporsinya masih cukup besar jika dibandingkan dengan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, yang juga semakin menurun. Dengan kondisi seperti ini, sulit rasanya untuk bisa menjalankan pencegahan kerusakan tambang dengan azas pembangunan yang berkelanjutan.

Proporsi Belanja ESDM	2010 R	2011 R	2012 R	2013M
Belanja Pegawai	36,4%	38,3%	16,3%	5,5%
Program Administrasi dan Aparatur	9,1%	16,0%	5,2%	2,3%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	2,0%	3,0%	1,4%	0,7%
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	31,6%	17,7%	65,5%	84,7%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi	20,0%	24,2%	9,5%	6,5%
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas	0,8%	0,7%	2,1%	0,4%

Sumber: APBD Kab. OKI, 2010-2012

Pemerintah daerah OKI sudah memiliki perda nomor 12 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengembangan ekonomi daerah. Dalam perda tersebut, terdapat 6 azas yang harus dijalankan pemerintah daerah dalam menjalankan pengembangan ekonomi daerah. Pertama, Ekonomi Demokrasi, Kedua, Pembangunan Berkelanjutan, Ketiga Pemerataan, Keempat, Keadilan, Kelima, Efisiensi dan Keenam, Memiliki Kepastian Hukum. Dalam menjalankan pengembangan ekonomi daerah, harus melibatkan pemerintah daerah, swasta, akademisi dan juga peran serta masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus berani mengambil sikap menjadikan anggaran sebagai instrumen pengawasan terhadap industri pertambangan. Membuat program dan kegiatan yang berorientasi terhadap pencegahan dan pengendalian eksploitasi pertambangan, dan juga memastikan proses reklamasi berjalan sesuai aturan yang berlaku saat ini.

Rekomendasi

Merespon temuan-temuan di atas, maka kami mendukung pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan khususnya pada sektor pertambangan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian manfaat investasi industri pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat serta dampak sosial-ekologi yang ditimbulkan. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat perda 12 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengembangan ekonomi daerah.
2. Dinas Pertambangan menyusun *grand design* pembangunan berkelanjutan secara komprehensif, kemudian menginternalisasikan dalam RKA SKPD melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap pencegahan dan pengendalian eksploitasi pertambangan, dan juga memastikan proses reklamasi berjalan sesuai aturan.
3. Melakukan Evaluasi atas izin-izin pertambangan yang sudah diberikan, dan mengambil sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.